

**PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA DALAM
MENGENDALIKAN TINGKAT PENGANGGURAN
DI KABUPATEN BONE BOLANGO**

Yanti Aneta¹, Abdul Wahab Podungge²

Universitas Negeri Gorontalo

Email: yanti_aneta@yahoo.co.id, podunggewahab@gmail.com

Abstract

This article discusses the strategic steps of the local government of Bone Bolango Regency in controlling the unemployment rate in Bone Bolango Regency; The method used in this research is qualitative with a descriptive approach. The results of the study show that: 1) The occurrence of unemployment caused by informal factors is due to the weak thinking power of the community in creating jobs. They do not dare to take risks to become entrepreneurs. Whereas the potential to become an entrepreneur in the MSME sector is more potential than having to wait for job vacancies; 2) Non-formal factors that cause open unemployment in Bone Bolango Regency are caused by the government's not optimally facilitating the community in adding their skills to the potential that can generate income; 3) Factors of Human Resources who do not master and operate technology make the number of unemployed in Bolango more and more;

Keywords: Role of Government; Unemployment Rate Control

Abstrak

Artikel ini membahas tentang apa saja langkah strategis pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango dalam mengendalikan tingkat pengangguran di kabupaten bone bolango;. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1)Terjadinya pengangguran yang disebabkan oleh faktor informal adalah dikarenakan lemahnya daya berpikir masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja. Mereka tidak berani mengambil resiko untuk menjadi wiraswasta. Padahal potensi menjadi wiraswasta dibidang UMKM lebih berpotensi dibandingkan harus menunggu lowongan pekerjaan; 2) Faktor Non Formal yang menjadi penyebab pengangguran terbuka di Kabupaten Bone Bolango disebabkan oleh tidak optimalnya pemerintah memfasilitasi masyarakat dalam menambah keterampilan mereka pada potensi yang dapat menghasilkan pendapatan; 3) Faktor Sumber Daya Manusia yang kurang menguasai dan mengoperasikan teknologi menjadikan pengangguran dibone Bolango semakin banyak; 4) Faktor komunikasi dan keterbatasan sarana prasarana menjadikan pemerintah terbatas dalam melakukan inovasi disektor pemberdayaan masyarakat

Kata Kunci: Peran Pemerintah; Pengendalian Tingkat Pengangguran

Sekretariat

Editorial: Program Studi Manajemen Universitas Fajar – Makassar,
Sulawesi Selatan, Indonesia

Telp/Hp: 081340202750/ Fax (0411) 459-938

Email: manor@unifa.ac.id

OJS: <http://journal.unifa.ac.id/index.php/manor/index>

PENDAHULUAN

Dilematika permasalahan pengangguran di Indonesia saat ini bukan hanya ditingkat pusat saja akan tetapi daerah juga mengalami masalah yang krusial terhadap penanganan angka pengangguran di daerahnya masing-masing. Provinsi Gorontalo misalnya yang merupakan Provinsi ke-33 di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Sejak dimekarkan pada tahun 2001 sasaran mobilisasi dari luar daerah perlahan masuk ke Gorontalo dalam rangka mengadu nasib mencari pekerjaan. Sayangnya mereka datang kurang dibekali dengan keahlian yang memadai sehingga sampai di Gorontalo hanya menjadi pengangguran.

Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Gorontalo yang tingkat pengangguran terbukanya cukup tinggi. Apalagi dengan adanya Pandemi Covid-19 sampai dengan saat ini sangat berdampak pada seluruh sektor dalam hidup dan kehidupan. Demikian pula dengan tingkat pengangguran yang bertambah akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan yang terpaksa dilakukan demi mempertahankan roda perusahaan. Kondisi semacam ini memaksa pemerintah untuk memberikan stimulus kepada masyarakatnya yang salah satunya melalui Program Bantuan Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi peneliti

menilai bahwa upaya tersebut hanya mempertahankan perekonomian dalam 3 bulan yang berjalan.

Berdasarkan observasi awal peneliti terkait jumlah pengangguran di Kabupaten Bone Bolango mengalami dampak yang cukup signifikan sehingga berdampak pada daya beli masyarakat yang turun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone Bolango yang dipublikasikan pada tahun 2021, terdapat 118.192 orang penduduk usia produktif yang terdampak Covid 19 atau sekitar 13,22 persen dari total jumlah penduduk. Dari jumlah angkatan kerja yang terdampak Covid-19 tersebut sebanyak 6.310 orang menjadi pengangguran dan 2.853 orang menjadi bukan angkatan kerja. Selain menjadi pengangguran penduduk usia kerja terdampak Covid-19 ada pula yang sementara tidak bekerja yakni 5.730 Orang. Peneliti menilai bahwa permasalahan ini terjadi disebabkan oleh tidak adanya langkah strategis pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam kebijakan pada sektor informal dan kebijakan sektor informal. Lebih lanjut peneliti juga berpendapat bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan faktor keterbatasan sumber daya manusia, faktor keterbatasan komunikasi, dan faktor keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka mengendalikan tingkat pengangguran adalah dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan skill masyarakat usia produktif. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP&TK) salah satunya memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang ketenagakerjaan terkait dengan: 1) Pemberian izin dan pelaksana pelayanan dibidang ketenagakerjaan; 2) Pengelolaan urusan ketatausahaan Disnaker; 3) Perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP&TK) perlu memikirkan strategi dalam rangka menurunkan angka pengangguran dengan cara menciptakan peluang-peluang bagi para pencari kerja diwilayah Kabupaten Bone Bolango. Rimate, V. A., & Engka, D. S. (2019) dalam jurnal hasil penelitiannya mengatakan bahwa seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan

adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang. Jumlah pengangguran biasanya seiring dengan penambahan jumlah penduduk serta tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru atau

keengganan untuk menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk dirinya sendiri atau memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau tidak memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif. Dikatakan kualitatif karena dalam mengkaji permasalahan peneliti tidak membuktikan ataupun menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian tetapi mengolah data dan menganalisis dengan baik suatu masalah secara *non numerik*. Metode Kualitatif untuk menguji hipotesis atau teori. Tipe penelitian ini memfokuskan pada deskripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki makna mendalam berasal dari informan dan perilaku masyarakat, serta keadaan yang diamati. Data hasil penelitian ini berupa fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti (Sugiyono, 2016).

Menurut (Moleong & Lexy, 2014) mengatakan bahwa sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data-data tambahan misalnya dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik

purposive sampling. Informan diperlukan untuk memperoleh data yang menyangkut dengan penelitian ini maka dari itu dibutuhkan informan yang memahami dan mengetahui permasalahan yang sedang diteliti. Adapun informan dalam artikel ini ialah aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP&TK) Kabupaten Bone Bolango. Serta beberapa informan masyarakat yang masuk dalam kategori pengangguran.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah mengamati kondisi kultural masyarakat pedalaman dan pesisir Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya penulis mewawancarai informan kunci yakni masyarakat yang termasuk dalam daftar pemilih tetap yang tersebar dalam 7 Kecamatan di wilayah pesisir dan pedalaman Kabupaten Bone Bolango. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles, Huberman & Saldana, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada poin ini peneliti menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Peneliti menggambarkan secara utuh hasil

Vol. 4, Nomor 1, Mei 2022

wawancara yang diungkapkan melalui fenomena dan data yang berhasil peneliti himpun dilapangan melalui informan peneliti yang bersumber dari pertanyaan-pertanyaan pada pedoman wawancara. Selanjutnya peneliti membedah hasil penelitian tersebut dengan membahas teori-teori pendukung yang bersumber dari pendapat para ahli yang dijadikan peneliti sebagai aplikasi teori yang diungkapkan saat membahas fakta yang terjadi dilapangan. Setelah semuanya disusun, langkah terakhir peneliti menginterpretasikan maksud dan tujuan dari informan peneliti dengan kajian teori dari para ahli dan menggambarkan kesimpulan yang diangkat dalam penelitian ini yang dibahas sebagai berikut:

Peran Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan pelayanan public pada Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas peraturan organisasi dan tata kerja lembaga lain dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Terkait dengan langkah strategi pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam mengurai tingkat kemiskinan, Kasi Pelatihan dan Tenaga Kerja mengatakan bahwa: “Kami menyediakan informasi terkait dengan lowongan pekerjaan yaitu dengan system Informasi ketenaga kerjaan (DISNAKER) Dengan akses Kemnaker.Go.id. Masyarakat Pencari Kerja Baik Penganggur dan Stengah Penganggur dalam usia 18 tahun keatas atau sudah berkeluarga. Insya Allah kedepanya nati di upayakan kerja sama dalam hal pemagangan tenaga kerja yang bekerja sama dengan pihak swasta.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango mempunyai fungsi dalam pembinaan pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya. Strategi tersebut bertujuan untuk mensinkronisasikan langkah kebijakan yang diambil oleh daerah tingkat Provinsi Dan Pusat. Terkait dengan hal tersebut Kasie Penempatan Dan Perluasan Tenaga Kerja mengatakan bahwa: Strategi kami lakukan yaitu berkoordinasi dan sinkronisasi Program antara Pemerintah Kabupaten dan Propinsi dan Pemerintah Pusat. Kami juga Menyiapkan data yang di butuhkan untuk menghimpun informasi tentang lowongan pekerjaan dari antar kerja.”

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Terkait dengan hal tersebut peneliti selanjutnya mewawancarai masyarakat pencari kerja, yang mengatakan bahwa: “Sejak tahun 2020 sampai sekarang belum bekerja, karna setelah saya menikah saya sudah berfokus pada urusan rumah tangga saja sehingganya saya sampai pada saat sekarang masih menganggur. Sebenarnya ada informasi terkait lowongan pekerjaan. namun data maupun Informasi yang di publikasikan oleh Dinas terkait berbeda dengan jurusan atau keahlian yang saya kuasai.”

Di DPM-PTSP & K sendiri terdapat seksi penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Akan tetapi kenyataan yang terjadi tingkat pengangguran di Kabupaten Bone Bolango masih juga dalam angka yang cukup memprihatinkan. Terbukti berdasarkan informan yang peneliti wawancarai ialah seorang sarjana tetapi sudah 1 tahun tetap menganggur. Seksi penempatan dan perluasan kesempatan kerja juga sebaiknya proaktif untuk memfasilitasi mereka. Karena tugas mereka adalah Melaksanakan Penatausahaan Administrasi dan Membuat rencana program kerja Penempatan

Perluasan Kesempatan Kerja dan Ketrasmigrasian serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. yaitu: 1) Melaksanakan dan menyusun Rencana Program Kerja Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Ketrasmigrasian; 2) Melaksanakan dan menyiapkan data penyusunan bahan pembinaan penempatan tenaga kerja; 3) Melaksanakan dan menyiapkan dokumen / regulasi tentang informasi pasar kerja, bursa pasar kerja, analisis serta penyuluhan / sosialisasi ; 4) Melaksanakan dan menyusun serta membuat system pedoman pembinaan informasi kebutuhan tenaga kerja melalui TI berbasis online; 5) Melaksanakan dan mengkoordinasikan serta melakukan kerjasama dengan pihak swasta bersama pemerintah daerah dalam hal ketersediaan lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja pada pihak perusahaan dan pemerintah.

Uraian diatas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sukirno (2004:327) yang mengatakan bahwa pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran,

produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan diatas peneliti berkesimpulan bahwa Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan.

Peran Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Dari Aspek Kebijakan Non Formal

Pengangguran adalah mereka yang masuk dalam angkatan kerja (15 Sampai 64 Tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Dalam rangka mengatasi pengangguran terbuka diperlukan langkah strategis dalam kebijakan sektor non formal oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Terkait dengan hal tersebut Kabid Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja Dan Hubungan Industrial mengatakan bahwa: “Masyarakat Umum Pencari Kerja antara lain: Pengngguran yang belum dapat lapangan pekerjaan.

Didata kami memang masih terdapat masyarkat yang membutuhkan pekerjaan. Apa lagi ditengah virus Corona kesempatan kerja semakin sedikit. Sebernarnya bone bolango pernah bekerja sama dengan perusahaan multi nasional PT.Nasional Gobel tapi telah berakhir.”

Tanggapan lain dari Kasie Pelatihan Tenaga Kerja ketika diwawancarai terkait langkah strategis non formal mengungkapkan bahwa: “Strategi kami lakukan yaitu berkoordinasi dan sinkronisasi Program terhadap pemerintah pusat sampai ke tingkat bawah tentang penanganan masyarakat pengangguran yakni dengan cara mengusulkan proposal-proposal terkait kebutuhan dari pada kolompok pencari kerja yang akan di kuatkan dengan pembekalan atau pelatihan yang berbasis Masyarakat sesuai dengan keterampilan yang di ajukan.”

Peran UPT ditinjau dari koordinasi antar unit kerja, pengembangan keahlian kerja, penyusunan pengembangan karier, pemberian insentif kerja, dan penetapan standar kerja. Terkait dengan hal tersebut, salah seorang masyarkat yang mengomentari langkah pemerintah dalam memfasilitasi pencarian kerja mengatakan bahwa: “Sejak tahun tahun 2020 sampai sekarang belum bekerja dan sudah berusaha untuk melamar pekerjaan di kantor Ombudsman, di Adira di Alfamart, Bank namun tidak diterima karna

terkendala dengan belum menguasai Komputer. Saya berharap pemerintah bone bolango membuka kesempatan untuk kursus keterampilan seperti computer agar masyarakat lebih terampil dalam menggunakan teknologi. saya belum pernah mendengar info dan data baik melalui medya social maupun melalui fublikasi yang di lakukan oleh Dinas tenaga Kerja.

Peneliti selanjutnya mewawancarai masyarakat lain juga berkomentar hampir sama dan mengatakan bahwa: “Sejak tahun tahun 2017 samapi sekarang belum pernah bekerja, dan sudah pernah mencoba di beberapa organisasi untuk melamar pekerjaan tapi tdk pernah lolos salasatunya pada pengregrutan Aparatur Desa tapi tidak pernah lolos. Kalau di Desa saya selama ini saya belum pernah mendengar informasi maupun publikasi yang di lakukan oleh Dinas terkait tentang lowongan pekerjaan, apalagi kalau informasi dan publikasi itu hanya melalui medya sosial barangkali kami sering terlewati dengan publikasi tersebut, karna di Desa kami jaringan internet belum memadai sehingganya info-info melalui medsos sering terlewatkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas jelas terlihat bahwa masyarakat juga berharap pemerintah memfasilitasi mereka dengan pencarian kerja. dalam konteks

pemerintahan pemerintah dapat berwenang menggaet investor nasional untuk menanamkan modalnya di Bone Bolango. Hal ini sebagai langkah strategis untuk menciptakan peluang kepada masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Tripomo, 2015:22) yang mengatakan bahwa Strategi organisasi terdiri menjadi dua, yaitu strategi inovasi dan strategi peningkatan kualitas. Strategi inovasi ditinjau dari koordinasi antar unit kerja, pengembangan keahlian kerja, penyusunan pengembangan karier, pemberian insentif kerja, dan penetapan standar kerja. Kemudian strategi peningkatan kualitas ditinjau dari penjabaran deskripsi kerja, partisipasi dalam pengambilan keputusan, penilaian pekerjaan, keseragaman perlakuan, dan pelatihan dan pengembangan kualitas.

Simamora (2014:11) juga menambahkan bahwa rumusan yang komprehensif tentang strategi adalah sebagai berikut: 1) Suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu dan integral; 2) Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam pengertian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya; 3) Menyeleksi bidang yang akan dilakukan atau akan dilaksanakan organisasi; 4) Mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman

dari lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta kelemahannya.

Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor Sumberdaya manusia juga pasti akan berpengaruh karena dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan untuk perusahaan maupun organisasi pemerintah dalam merekrut tenaga kerja. Sehubungan dengan hal tersebut salah seorang masyarakat pencari kerja mengatakan bahwa: “Saya tidak punya keahlian apa-apa, akan tetapi berkaitan dengan jurusan saya, di bidang Administrasi Publik Insya Allah saya hanya bisa berkolaborasi sesuai dengan jurusan saya tersebut. Dengan cara mengajukan permohonan, dan terkadang juga meminta bantuan kepada orang-orang yang berpengaruh di tempat saya melamar namun masih menemui kegagalan, sehingganya sampai pada saat sekarang masih menganggur.

Peran unit pelaksana teknis yang efektif hendaklah memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak mencerai beraikan satu dengan yang lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut Kabid Penempatan Dan Hubungan Industrial mengatakan bahwa: “Kami menghimpun informasi tentang lowongan pekerjaan dari antar kerja melalui media Sosial dan Medya Elektronik dan penyebaran informasi ke masyarakat umum melalui Camat, Kepala Desa serta pendamping/TKS yang di tempatkan di

beberapa lokasi di Kabupaten Bone Bolango.

Media sosial dan webside pemerintah menjadi salah satu wadah yang efektif untuk menghasilkan informasi valid tentang lowongan pekerjaan. Akan tetapi masih terdapat hambatan-hambatan didalamnya. Sehubungan dengan hal tersebut Kasie Penempatan Dan Perluasan Tenaga Kerja berpendapat bahwa: “Hambatan utama adalah kurangnya dana pendukung untuk memfasilitasi sarana dan prasarana serta oprasional dalam melaksanakan program dan kegiatan mengatasi pengangguran, sehingga pengangguran masih banyak yang harus di perhatikan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, jelas terlihat bahwa Dinas DPM-PTSP&K mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan Pengujian kelayakan terhadap pemberian izin dibidang penempatan perluasan kesempatan kerja sector formal dan informal. Oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha, lembaga kerja sama bipartit (Penyelesaian antara kedua belah pihak, pekerja dan pengusaha) dan Tripartit (Penyelesaian antara ketiga belah pihak, pekerja, pengusaha dan pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Purwanto (2008:

4) bahwa strategi penyiapan SDM hendaknya disusun di atas landasan keberhasilan yang telah dicapai. Jangan menyusun strategi diatas kegagalan. Tanda-tanda dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait, terutama para eksekutif, dari semua pimpinan unit kerja dalam organisasi.

Faktor Komunikasi Sarana Dan Prasarana

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak maret tahun 2020 lalu sampai dengan saat ini sangat berdampak pada seluruh sektor dalam hidup dan kehidupan. Demikian pula dengan tingkat pengangguran yang bertambah akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan yang terpaksa dilakukan demi mempertahankan roda perusahaan. Kondisi semacam ini memaksa pemerintah untuk memberikan stimulus kepada masyarakatnya yang salah satunya melalui Program Bantuan Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan. Peneliti berpendapat bahwa antara pemerintah dengan masyarakat harus membangun komunikasi yang efektif melalui jejaring media sosial dengan cara meningkatkan sarana prasarana media komunikasi media sosial untuk memfasilitasi pengangguran. Sehubungan dengan hal tersebut salah seorang masyarakat berkomentar bahwa: "Saya belum pernah mendengar info dan

data baik melalui medya social maupun melalui fublikasi yang di lakukan oleh Dinas tenaga Kerja."

Peran unit pelaksana teknis hendaklah memuaskan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru pada kelamahnya. Selain itu, hendaklah juga memanfaatkan kelemahan persaingan dan membuat langkah- langkah yang tepat untuk menempatkan posisi kompetitif yang lebih kuat. Terkait dengan hal tersebut Kasie Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja berkomentar bahwa: komunikasi yaitu berkoordinasi dan sinkronisasi Program antara Pemerintah Kabupaten dan Propinsi dan Pemerintah Pusat. Tetapi memang diakui kami agak sedikit terkendala soal anggaran. Sehingga anggaran kami tidak cukup untuk mengcover smua pencari kerja. yang pasti ini dilakukan bertahap setiap tahunnya menyesuaikan dengan porsi anggaran. Ini juga merupakan visi misi bupati Hamim dan Wakil Merlan untuk mengatasi pengangguran terbuka. Insha allah berjalan dengan efektif."

oleh Sukirno (2000) dalam pandangan teoritis, bahwa pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Hal tersebut disebabkan ketidakseimbangan pasar pada

tenaga kerja sehingga menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Akan tetapi pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur. Seorang penganggur adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari duahari selama seminggu sebelum berusaha memperoleh pekerjaan. Disamping itu juga pengangguran dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapat pekerjaan tetapi belum memperolehnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadinya pengangguran yang disebabkan oleh faktor informal adalah dikarenakan lemahnya daya berpikir masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja. Mereka tidak berani mengambil resiko untuk menjadi wiraswasta. Padahal potensi menjadi wiraswasta dibidang UMKM lebih berpotensi dibandingkan harus menunggu lowongan pekerjaan.
2. Faktor Non Formal yang menjadi penyebab pengangguran terbuka di Kabupaten Bone Bolango disebabkan oleh tidak optimalnya

pemerintah memfasilitasi masyarakat dalam menambah keterampilan mereka pada potensi yang dapat menghasilkan pendapatan.

3. Faktor Sumber Daya Manusia yang kurang menguasai dan mengoperasikan teknologi menjadikan pengangguran dibone Bolango semakin banyak
4. Faktor komunikasi dan keterbatasan sarana prasarana menjadikan pemerintah terbatas dalam melakukan inovasi disektor pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Miles, Matthew, B., & A, M. H. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, & Lexy, J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Franita, R. (2016). Analisa pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(3), 88-93.
- Sari, R. D. (2016). Pengembangan Model Pelatihan Tenaga Kerja Sektor Informal Di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. *Kebijak. dan Manaj. Publik*, 4, 107-115.
- Rumate, V. A., & Engka, D. S. (2019). Pengaruh Tingkat Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal pembangunan ekonomi dan keuangan daerah*, 19(3).

Shaleh, M., & Yuliana, Y. (2020).
PENGARUH PENGAKUAN,
INSENTIF, DAN LINGKUNGAN
KERJA TERHADAP KINERJA
KARYAWAN PADA PT.
PELABUHAN INDONESIA IV
CABANG MAKASSAR. *MANOR:
JURNAL Manajemen dan Organisasi
Review*, 2(1), 47-57.